

# Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs *Website* Pemerintah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia 2021)

Febrina Sabrini<sup>1\*</sup>, Vita Fitria Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

\*Korespondensi: [febrina.sabrini42@gmail.com](mailto:febrina.sabrini42@gmail.com)

---

**Tanggal Masuk:**

07 Februari 2024

**Tanggal Revisi:**

13 Mei 2024

**Tanggal Diterima:**

16 Mei 2024

---

**Keywords:** *Availability of Financial Reports, Audit Opinion, Audit Findings, Follow-up to Audit Results*

---

**How to cite (APA 6<sup>th</sup> style)**

Sabrini, F., & Sari, V.F. (2024). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs *Website* Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Indonesia 2021 *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6 (2), 746-760.

---

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1537>



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

---

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah merubah cara kita menjalani keseharian, termasuk dalam hal bagaimana masyarakat memperoleh informasi dari pemerintah daerah. Pesatnya pertumbuhan teknologi dan sistem informasi sangat mempengaruhi sektor pemerintahan Indonesia yang diidentifikasi adanya berbasis elektronik (*e-government*) (Alwi, Kholida dan Bachtiar, 2014).

Perkembangan dapat memajukan pemerintah daerah di Indonesia agar lebih transparan dalam menetapkan laporan keuangan di *website* pemerintah yang dikenal dengan *e-*

*government*. Ketersediaan informasi keuangan dan non keuangan di *website* yang ditetapkan pemerintahan dalam mendukung pemerintah daerah untuk mengirimkan informasi dengan cepat, lancar dan murah (Nor et al., 2019). Bagi pemerintah saat ini internet merupakan media yang paling mudah dijangkau dan paling *cost effective* terhadap pemerintah daerah dalam menyajikan informasi tentang pengelolaan keuangan serta layanan terhadap pemerintah yang transparan dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Penggunaan *website* sebagai media untuk ketersediaan informasi keuangan yang mana dianggap efektif dan efisien sebagai langkah untuk meningkatkan pengendalian terhadap pemerintah daerah supaya terhindar dari tindakan korupsi serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah (Bertot et al., 2010). Jadi dapat kita lihat bahwa penggunaan *website* bagi pemerintahan daerah untuk menyediakan laporan keuangannya memiliki dampak positif bagi masyarakat dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet. Di Indonesia, akses informasi di situs *website* pemerintah daerah masih bersifat sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, ketersediaan informasi berbeda-beda pada setiap *website* pemda.

Menurut (Trisnawati,2020;Yustikasari,2018), hal ini terbukti hanya beberapa pemerintah daerah telah menggunakan internet sebagai media pelaporan keuangan dan mencatat bahwa tidak semua pemerintah daerah mempublikasikan laporan keuangan secara komprehensif. Menurut Forum Transparansi Anggaran Indonesia, sebagian besar pemerintah daerah belum menerapkan ketersediaan pengelolaan anggaran di website resmi, karena ketersediaan data keuangan diperoleh via internet masih bersifat sukarela dan belum memiliki sanksi mewajibkan (Nosihana, Ariefia dan Yaya, 2016). Karena tidak ada sanksi mewajibkan terkait belum diungkapkannya informasi keuangan, hal ini menyebabkan penggunaan situs yang tidak efisien dalam upaya untuk menjadi lebih transparan.

Selanjutnya kasus dari komisi informasi pusat mencatat selama 2021 terdapat kenaikan ketersediaan informasi dari badan publik dibandingkan dengan tahun lalu, namun masih banyak badan publik yang belum terbuka. Data pada capaian informatif menunjukkan pada tahun 2021 meningkat jadi 24,63% dari sebelumnya 17% pada tahun 2020. Selain transparansi anggaran, dalam OBS 2021 (*Open Budget Survey*) menampilkan aspek transparansi publik dan pengawasan anggaran (*Budget Oversight*), dimana nilai partisipasi publik dalam tahun 2021 mencapai skor 24 dan *budget oversight* terdapat nilai 61 (<https://anggaran.kemenkeu.go.id>).

Disamping masalah tersebut tingkat pengguna internet di Indonesia berdasarkan hasil survey dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet (APJII) tahun 2021-2022 mencapai 77,02%, di mana ada 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terhubung ke internet pada tahun 2021-2022. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ada lonjakan penetrasi internet di tanah air, Misalnya pada tahun 2018 sebesar 64,80% yang kemudian terus tumbuh di 2019-2020 dengan penetrasi internetnya 73,70%, angka tersebut setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Tingginya tingkat penggunaan internet yang di daerah menyebabkan tingginya tekanan dari masyarakat akan ketersediaan informasi keuangan melalui internet. Berdasarkan data tersebut, hal ini menunjukkan bahwa ada tekanan pada pemerintah untuk dapat secara teratur mengungkapkan informasi keuangan melalui internet untuk memastikan transparansi dalam operasi pemerintah. Namun, pemerintah belum meningkatkan penggunaan situs *web* sebagai sarana komunikasi informasi keuangan tentang pengelolaan sumber daya (Sofyani & Dwirama, 2021).

Dari penjelasan ketersediaan laporan keuangan diatas, terlihat jelas bahwa ketersediaan laporan di situs *website* merupakan masalah yang kompleks dan sulit untuk dihilangkan. Ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* bersifat sukarela membuat kesenjangan dalam praktik keterbukaan informasi keuangan melalui e-government dan

sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penggunaan teknologi internet (Verawaty, 2015). Kinerja pemerintah digambarkan dengan tingkat pencapaian tujuan instansi pemerintah yakni tercapainya visi, misi dan strategi pemerintah daerah sebagai indikator tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja pemerintah daerah dapat dikategorikan baik jika dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan (Puspitasari, 2020). Aspek pengelolaan keuangan menjadi ranah pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan keuangan daerah termasuk unsur dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah suatu pemda yang tidak dapat dipisahkan sehingga diperlukan pengendalian serta pengawasan yang baik agar tidak terjadi kecurangan (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Di Indonesia, pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Opini audit adalah pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2013). Menurut (Prasasti et al., 2017), opini audit menyediakan informasi yang sesuai dengan pengguna informasi, dalam pemerintah sendiri wajib memahami kinerja, evaluasi, masyarakat serta investor untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Oleh sebab itu, opini audit menjadi salah satu indikator yang penting bagi kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah. Jika terjadi penyimpangan yang ditemukan oleh BPK melalui pemeriksaannya, akan mempengaruhi ketersediaan laporan keuangan dan pemerintah daerah dengan ketetapan hasil audit yang buruk akan menyebabkan laporan keuangan belum tersedia di *website* resmi (Handayani, 2010). Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 opini audit menyatakan, profesional auditor tentang keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wau & Ratmono, 2015) dan (R. P. Nurhidayati & Rahayu, 2020) menunjukkan pengaruh *Internet Financial Reporting* (IFR) dengan memasukkan faktor opini audit dapat diperoleh hubungan positif terhadap ketersediaan informasi keuangan di internet dan menyatakan bahwa pemerintah akan memperlihatkan sinyal pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bertanggung jawab dengan mempublikasikan laporan keuangannya yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian di internet. Namun pada penelitian (Rahayu et al., 2021) hal ini tidak sejalan dengan hasil yang diperoleh karena hasil audit tidak memiliki hubungan signifikan terhadap transparansi keuangan daerah melalui *website* resmi pemerintah daerah.

Temuan audit merupakan kumpulan informasi dan fakta mengenai situasi yang telah diperiksa dan dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan pemerintah daerah (ISO 9000:2008). Apabila Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak hal yang tidak wajar saat menginspeksi laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut dianggap tidak memadai. Apabila situasi semacam ini terwujud, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan dengan cepat meminta pemerintah daerah tersebut untuk memperbaiki dan meningkatkan tingkat keterbukaan sebagai langkah perbaikan terhadap ketersediaan laporan keuangan yang dipresentasikan. Hal ini menunjukkan bahwa temuan audit memiliki dampak yang menguntungkan dan penting terdapat tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di *website* (Kinerja & Tengah, 2022). Penelitian sebelumnya terkait variabel temuan audit yaitu (Liestiani, 2008) menunjukkan bahwa jumlah temuan audit dan nilai temuan sebagai salah satu yang mempengaruhi pengungkapan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan positif dengan jumlah temuan audit. Hal ini membuktikan teori yang mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memenuhi rekomendasi yang diberikan oleh BPK untuk melakukan perbaikan yang meningkatkan pengungkapan pada laporan

keuangannya (Saputra, 2012). Selanjutnya menurut penelitian (Laporan & Pemerintah, n.d.) menjelaskan bahwa jumlah temuan audit tidak berdampak signifikan bagi tingkat ketersediaan karena jumlah temuan audit BPK tidak serta merta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Dalam terjadinya pertentangan atas hasil penelitian, dan adanya ketidakkonsistenan hasil atas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan laporan keuangan, serta telah munculnya peraturan baru tentang Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010, maka dibutuhkan penelitian lanjutan guna menguji ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan dan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan entitas yang diperiksa dan pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan. Pengambilan keputusan dapat menghentikan dan mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, kecurangan dan pemborosan dengan masukan dari auditor (Umar, 2012). Koreksi pasca audit merupakan bentuk pertanggungjawaban kementerian/lembaga atas kesalahan dalam pertanggungjawaban keuangan publik (Liu & Lin, 2012). Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap peraturan resmi, selain itu mereka juga bertanggung jawab dalam mengelola keuangan negara dan mengawasi hasil dari pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Badan Periksa Keuangan (BPK) (Dasar et al., 1945). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Masyitoh 2014), hal ini menunjukkan bahwa semakin luas pengawasan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin lemah persepsi korupsi yang ada. Pada laporan hasil pemeriksaan dimana BPK masih menemukan sejumlah masalah dalam pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan diminta untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait temuan audit sebagai bentuk tingkat penyajian dalam ketersediaan informasi pada pemerintah daerah kepada laporan keuangan (Ridwan & Yahya, 2020).

Dari penjelasan diatas perbedaan penelitian sebelumnya adalah peneliti memperluas sampel penelitian oleh (Fatmawati et al., 2019) dengan sampel penelitian kabupaten/kota di Pulau Jawa menjadi seluruh kabupaten/kota di Indonesia, hal ini dimaksudkan agar lebih representatif atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan tambahan variabel independen yaitu variabel opini audit dan perbedaan waktu dalam penelitian serta kondisi karakteristik masing-masing di pemerintah daerah. Variabel opini audit sebagai hasil salah satu pemeriksaan oleh BPK yang menunjukkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah (Pauli, 2015). Perolehan opini audit dari BPK RI berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengisyaratkan kinerja pemerintah daerah yang baik. Penelitian ini menggunakan tahun 2021 untuk melihat pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan laporan keuangan. Hal ini karena laporan keuangan audit setiap periode kemudian diterbitkan pada tahun berikutnya. Penggunaan periode penelitian tahun 2021 disebabkan karena adanya batasan perolehan data untuk menguji variabel ketersediaan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pentingnya ketersediaan laporan keuangan pemerintah daerah di situs *website* serta memberikan saran seperti faktor-faktor yang mempengaruhi agar hasil ketersediaan laporan keuangan secara sukarela dapat terwujud, pada *website* pemerintah daerah dengan sifat tanggung jawab dan good government governance dapat dilaksanakan.

## REVIU LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Agensi melibatkan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu pemberi hak dan tanggung jawab pada satu individu atau kelompok sebagai pemegang kendali utama

(principal), kepada individu atau entitas yang bertugas mengelola aset (agen) dengan tujuan membuat keputusan yang sejalan dengan kepentingan pemegang kendali utama (Anthony, 2011). Pada sektor publik di Indonesia, *principal* adalah orang menyampaikan wewenang dan kekuasaan dalam mewajibkan pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai *agent*, dengan tujuan agar *agent* bertindak atau bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan, dan pemerintah juga dimintai pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukannya.

Kaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah masyarakat sebagai pelaku memiliki hak untuk menentukan dan menyetujui pemerintah daerah, dengan keinginan agar pemerintah lebih meningkatkan kinerja lokalitas yang baik dari segi perkembangan daerah maupun pendapatan yang dihasilkan daerah. Bagi Pemerintah (*agent*) sangat penting bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dengan bentuk laporan keuangan daerah sebagai pertanggungjawaban.

### **Good Public Governance dan E- Government**

Pedoman *Good Public Governance* Indonesia diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), mempunyai lima prinsip yang harus dipatuhi bagi pemerintah, yaitu demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dan legalisasi, maupun kewajiban dan kesetaraan. Keterbukaan suatu ketersediaan dan penyediaan informasi yang cukup dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sangat penting (Nasional & Governance, 2008). Publik membutuhkan transparansi, supaya publik mampu mengontrol apa saja kegiatan pemerintah dan khususnya pemerintah daerah.

### **Ketersediaan Sukarela Laporan Keuangan pada Situs Website Pemerintah Daerah**

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 mengenai keuangan negara yang berbunyi setiap pimpinan instansi pemerintah wajib mengatur dan menyampaikan laporan keuangan menurut lembaga, lalu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mengamantakan bahwa lembaga pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengatur serta mengirimkan laporan keuangan bagi laporan kinerja pemerintah.

### **Opini Audit**

Opini audit merupakan informasi yang sangat penting bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut, baik bagi pemerintah sendiri untuk mengetahui kinerja dan membuat penilaian, maupun bagi publik dan investor dalam mengupayakan kepercayaan terhadap pemerintahan (Terhadap et al., 2018). Kemampuan pemerintah daerah juga tercerminkan dalam laporan keuangannya. Pada akhir setiap siklus akuntansi, pemerintah diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan untuk badan yang melakukan secara bebas, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (Nosihana, Ariefia dan Yaya, 2016)

### **Temuan Audit**

Pasal 15 UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No. 2004 menyatakan bahwa “penyelidikan adalah suatu proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk mengevaluasi kebenaran, keakuratan, keandalan, dan kredibilitas informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara”. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh badan pemeriksaan keuangan (BPK) yang terdiri dari pemeriksaan operasional dan pemeriksaan yang berkaitan dengan tujuan tertentu.

## **Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan**

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Peraturan Komisi Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017) menyatakan bahwa, “Rekomendasi adalah rekomendasi yang dibuat oleh pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang disampaikan kepada orang dan/atau organisasi, berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

## **Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah**

Pengungkapan laporan keuangan tahunan merupakan salah satu tanda ukur kinerja yang terstruktur dari pemerintah daerah. Pendapat BPK yang baik tentang laporan keuangan pemerintah daerah akan mengarah pada kecenderungan yang lebih tinggi bagi pemerintah daerah untuk menerapkan praktik pelaporan keuangan untuk menunjukkan kepada publik kemampuan dan komitmennya sesuai dengan SAP. Kecenderungan melaporkan keuangan pemerintah setelah diaudit sejalan dengan teori keagenan yang artinya pemerintah telah mendapat mandate dari masyarakat untuk mempertanggungjawabkan kinerja. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Opini audit bertahap meliputi: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan diutamakan adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah daerah yang mendapat komentar wajar tanpa pengecualian lebih cenderung mempublikasikan laporan keuangan melalui internet untuk menunjukkan kualitas pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Sebaliknya, opini audit selain WTP dapat menimbulkan konotasi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah atau persepsi umum bahwa pemerintah berusaha menyembunyikan informasi keuangannya. Semakin akuntabel laporan keuangan pemerintah maka kinerja pemerintah daerah meningkat. Penelitian sebelumnya disebutkan bahwa terdapat hubungan positif bagi opini audit terhadap ketersediaan laporan keuangan di pemerintah daerah (Sofyani & Dwirama, 2020) (Nor et al., 2019).

**H1:** Opini audit Berpengaruh Positif Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan pada *Website* Pemerintah Daerah di Indonesia

## **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah**

Teori *agency* menjelaskan terkait variabel temuan audit. Teori tersebut menjelaskan hubungan kontrak antara principal dan juga pihak agen. Salah satu prinsipal membuat kontrak dengan pihak agen dengan harapan oleh prinsipal (Smulowitz et al., 2019). Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan pemda atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pemda menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemda tersebut. Ketidakpatuhan terhadap hukum menyebabkan kerugian negara atau daerah, potensi kerugian negara atau daerah, kekurangan pendapatan, kelemahan administrasi, kurangnya berhemat, inefisiensi, dan ketidakefektifan. Temuan mengakibatkan penurunan kinerja pemerintah daerah karena salah satu pihak akan merasa dirugikan. Semakin banyak pelanggaran oleh pemda maka semakin buruk kinerja pemda. Kinerja pemerintah daerah dikatakan buruk dapat tercermin dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah (Fatmawati et al., 2019). Temuan audit mengindikasikan bahwa masih banyak terjadi kesalahan dalam menyusun laporan keuangan. Penelitian (Siregar & Rudiansyah, 2019) dan (Oka Purnawan

Widodo, 2017) dalam hasil risernya menunjukkan bahwa hasil memiliki dampak negatif terhadap opini dari BPK. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang serupa, menunjukkan bahwa berupa pelanggaran terhadap peraturan hukum berdampak buruk terhadap temuan audit. Namun, hasil berbeda ditemukan dalam (OKTOFAN, 2017) yang mengindikasikan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap temuan audit.

**H2:** Temuan Audit Berpengaruh Positif Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs *Website* Pemerintah Daerah di Indonesia.

### **Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan di Situs Website Pemerintah Daerah**

Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Upaya pemerintah tersebut tentunya akan berdampak pada pelayanan kepada masyarakat sehingga tercapainya kedaulatan rakyat. Sehingga semakin banyak rekomendasi yang ditindaklanjuti menandakan bahwa kinerja pemerintah daerah tersebut semakin meningkat (Fatmawati et al., 2019). Menurut (Sari et al, 2015) dan (Agusti, 2014) mengungkapkan bahwa semakin banyaknya rekomendasi yang dilakukan oleh pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang terwakili pada tingkat pengungkapan yang semakin tinggi. Semakin banyak pemeriksaan lanjutan yang dilakukan, semakin baik pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan (Setyaningrum, 2015), menjelaskan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap pemda.

**H3:** Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Berpengaruh positif Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Situs *Website* Pemerintah Daerah di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kausal komparatif dan penelitian historis. Penelitian ini dikatakan demikian karena memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan diantara opini audit, temuan audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagai variabel bebas terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs *website* pemerintah daerah sebagai variabel terikat. Penelitian ini dikatakan penelitian historis karena objek yang diteliti merupakan data-data pemerintah daerah dari masa lalu (tahun lalu).

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini meliputi seluruh situs resmi pemerintah daerah, dengan fokus pada pemerintah daerah dengan tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat 34 pemerintah provinsi, 415 pemerintah kabupaten dan 93 pemerintah kota dalam populasi tersebut dan data yang diambil berasal dari tahun 2021. Sampel penelitian ini adalah pemerintah daerah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah provinsi/kota di Indonesia,
- b. Memiliki *website* resmi dan dapat diakses saat melakukan penelitian,
- c. Dengan kriteria data terkait penelitian yang tersedia di situs *website* pemerintah,
- d. *Website* pemerintah daerah yang dapat diakses secara sukarela.

### **Variabel Penelitian dan Pengukurannya** **Ketersediaan Laporan Keuangan di *Website* Pemerintah Daerah (Y)**

Ketersediaan laporan keuangan pemda di website merupakan tanggung jawab pemerintah atas keuangan yang telah dikelola secara online (Perez et al, 2014). Selain sektor bisnis, sektor publik seperti pemerintah daerah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan jaringan internet untuk menyampaikan informasi keuangan kepada berbagai pemangku kepentingan. Pasal 13 dari PP Nomor 65 Tahun 2010 yang terkait dengan sistem informasi keuangan daerah menyebutkan “pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi melalui *website* resmi” informasi melalui situs resmi “ variabel ini diukur sebagai penelitian (Verawaty, 2015) dengan menggunakan variabel biner atau dummy yaitu “0” tidak dipublikasikan dan “1” dipublikasikan.

### Opini Audit (X1)

Opini audit diterima berdasarkan hasil opini laporan keuangan tahunan BPK pemerintah daerah tahun 2021. Pada penelitian ini opini audit diukur dengan cara yang sama seperti pada penelitian (Nor et al., 2019), dengan memakai pengukuran variabel dalam skala satu hingga lima, mengamati opini audit : 1 opini tidak menyatakan pendapat (TMP), 2 opini tidak wajar (TW), 3 opini wajar dengan pengecualian (WDP), 4 opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (DPP), serta 5 opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

$$TMP = 1 ; TW = 2 ; WDP = 3 ; WTP DPP = 4 ; WTP = 5$$

### Temuan Audit (X2)

Temuan audit yang ditemukan oleh BPK berkisar dari pelanggaran administratif hingga substantif dan yang berlaku (Liestiani, 2008). Kesimpulan temuan audit adalah kepatuhan terhadap aturan yang berlaku untuk klien, serta pengendalian internal, serta hukum dan peraturan perundang-undangan yang diamati oleh auditor selama audit (Liestiani, 2008). Penelitian ini menggunakan proksi temuan audit yang dikembangkan oleh (prasetyaningsih, 2015) dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Temuan Audit} = \frac{\text{Temuan audit (rupiah)}}{\text{Total anggaran belanja}}$$

### Tindak lanjut hasil pemeriksaan (X3)

Pertimbangan dari auditor sering kali menghasilkan saran kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk kelemahan dalam sistem pemerintah daerah. Rekomendasi yang diajukan oleh auditor akan disetujui oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkat kompensasi yang telah ditetapkan. Dalam mengukur pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, digunakan perbandingan antara lain yang telah dilaksanakan sesuai rekomendasi dibandingkan nilai rekomendasi itu sendiri. Dengan rumus sebagai berikut:

$$PPTLHP = \frac{\sum rkm - (\sum btl + \sum bstl + \sum tdtl)}{\sum rkm} \times 100\%$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Dari 542 sampel pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota memuat nilai rata-rata, nilai standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum dari seluruh pengujian data kuantitatif dalam studi ini, baik variabel terikat maupun variabel bebas. Hasil dari statistik deskriptif dapat terlihat pada Tabel 1 yaitu, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Statistik Deskriptif**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Skewness
Opini Audit	542	4	1	5	2622	4.84	.586	-3.720
Temuan Audit	542	71	0	71	7078	13.06	6.331	2.436
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	542	1.0000	.0000	1.0000	183.5464	.338647	.2761986	.494
Ketersediaan Laporan Keuangan	542	1	0	1	143	.26	.441	1.075
Valid N (listwise)	542							

Tabel 1 menunjukkan bahwa penelitian ini mempertimbangkan tiga variabel yang berbeda, dengan sampel yang terdiri dari 542. Variabel opini audit (X1) memiliki rentang nilai 1 hingga 5. Nilai maksimum sebesar 5, Sedangkan nilai minimum sebesar 1. Nilai mean (rata-rata) menunjukkan sebesar 4,84 hal ini berarti terdapat perolehan opini audit kabupaten/kota di Indonesia sudah baik dan sebagian besar opini audit diterima sepenuhnya dengan nilai standar deviasi sebesar 0,586. Variabel temuan audit (X2) memiliki nilai maksimum sebesar 71. Sedangkan, nilai minimum sebesar 0. Nilai mean (rata-rata) menunjukkan sebesar 13,06 dengan nilai standar deviasi sebesar 6,331. Variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan (X3) memiliki rentang nilai 0,0000 hingga 1. Nilai maksimum sebesar 1. Sedangkan, nilai minimum sebesar 0. Nilai mean (rata-rata) menunjukkan sebesar 0,338647 hal ini berarti rata-rata jumlah tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia sebanyak 33,9% dengan nilai standar deviasi sebesar 0,2761986. Variabel ketersediaan laporan keuangan (Y) menandakan pada nilai rata-rata yaitu 0,26. Terlihat bahwa pemerintah daerah mendapat skor 0 untuk nilai terendah. Dari data diatas tingkat distribusi ketersediaan laporan keuangan dapat dilihat dari standar deviasi sebesar 0,441.

## UJI ASUMSI KLASIK

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 2**  
**Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Opini Audit	.991	1.009
	Temuan Audit	.968	1.033
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	.961	1.040

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel independen seperti opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lebih besar dari 0,1 dan VIF yaitu kurang dari 10 sehingga riset ini dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

## UJI MODEL PENELITIAN

### Uji Kelayakan Model (goodness of fit model)

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Kelayakan Model**  
**Hosmer and Lemeshow Test**

Step	Chi-square	df	Sig.
1	2.041	8	.980

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi adalah sebesar 0,980. Nilai signifikansi yang diperoleh tersebut jauh di atas 0,05 yang berarti hipotesis ( $H_0$ ) diterima

### Uji Model Fit

**Tabel 4**  
**Iteration History 0**

Iteration History <sup>a,b,c</sup>			Coefficients	
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	
Step 0	1	626.211	-.945	
	2	625.504	-1.025	
	3	625.504	-1.026	
	4	625.504	-1.026	

a. Constant is included in the model.

b. Initial -2 Log Likelihood: 625.504

c. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan hasil pengolahan SPSS 23.0, pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai -2 Log Likelihood awal (tabel Iteration History 0) adalah sebesar 625,504. Langkah selanjutnya adalah membandingkan antara nilai -2 Log Likelihood awal (tabel Iteration History 0) dengan -2 Log Likelihood akhir (tabel Iteration History 1).

**Tabel 5**  
**Iteration History 1**

		Iteration History <sup>a,b,c,d</sup>				Coefficients	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Iteration		-2 Log likelihood	Constant	Opini Audit	Temuan Audit		
Step 1	1	608.056	-3.209	.322	.042	.485	
	2	605.052	-4.520	.532	.051	.642	
	3	604.962	-4.875	.600	.052	.655	
	4	604.962	-4.899	.605	.052	.655	
	5	604.962	-4.899	.605	.052	.655	

a. Method: Enter

b. Constant is included in the model.

c. Initial -2 Log Likelihood: 625.504

d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed by less than .001.

Berdasarkan hasil output pada tabel 5 tersebut terjadi penurunan nilai antara -2 Log Likelihood awal dan akhir sebesar 625,504. Penurunan tersebut dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model regresi memperbaiki model fit atau dengan kata lain model fit dengan data.

### Koefisien Determinasi (*Mc Fadden R-Squared*)

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**  
**Pseudo R-Square**

Cox and Snell	.583
Nagelkerke	.851
McFadden	.757

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa dalam uji McFadden R-squared, memiliki nilai koefisien determinasi yaitu 0,757. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketiga faktor antara lain, opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berperan penting dalam mempengaruhi ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah sebesar 75,7% sedangkan sisanya 24,3% yang dipengaruhi oleh variabel lain.

## Analisis Regresi Logistik

**Tabel 7**  
**Uji Regresi Logistik**

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 <sup>a</sup>	Opini Audit	.605	.261	5.364	1	.021	1.830
	Temuan Audit	.052	.016	10.451	1	.001	1.053
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	.655	.369	3.160	1	.075	1.926
	Constant	-4.899	1.316	13.863	1	.000	.007

Berdasarkan tabel 7, maka model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{DISC} = -4,899 + 0,605 X_1 + 0,052 X_2 + 0,655 X_3 + e$$

## Uji hipotesis

**Tabel 8**  
**Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.302	.162		-1.864	.063
Opini Audit	.080	.032	.107	2.511	.012
Temuan Audit	.010	.003	.150	3.479	.001
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	.121	.069	.076	1.757	.079

a. Dependent Variable: Ketersediaan Laporan Keuangan

Berdasarkan Tabel 8 terlihat hasil pengujian t untuk hipotesis yaitu: Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai *t-statistic* variabel opini audit yaitu 2,511 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ , maka  $H_1$  didukung. Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai *t-statistic* variabel temuan audit yaitu 3,479 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka  $H_2$  didukung. Dan pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia, nilai *t-statistic* variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu 1,757 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,079 > 0,05$ , maka  $H_3$  ditolak.

### **Pembahasan Penelitian**

#### **Pengaruh Opini Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah opini audit berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis T terlihat bahwa nilai t-statistic variabel opini audit yaitu 2,511 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,012 < 0,05$ , maka H1 didukung. Artinya opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia.

#### **Pengaruh Temuan Audit Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah temuan audit berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil dari Nilai T-statistic variabel temuan audit yaitu 3,479 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ , maka H2 didukung. Artinya temuan audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia.

#### **Pengaruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Ketersediaan Laporan Keuangan Di Situs Website Pemerintah Daerah di Indonesia.**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis T terlihat bahwa nilai t-statistic variabel tindak lanjut hasil pemeriksaan yaitu 1,757 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,079 > 0,05$ , maka H3 ditolak. Artinya tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia.

## **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Bersumber pada pengujian hipotesis riset pada bagian lebih dahulu hasil riset ini bisa disimpulkan sebagai berikut: (1) Opini audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Semakin besar mutu opini yang diberikan semakin lengkap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. (2) Temuan audit berpengaruh positif terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Semakin banyak temuan audit pada laporan keuangan akan semakin besar kemungkinan bahwa daerah tersebut semakin lengkap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah. (3) Tindak lanjut hasil pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan laporan keuangan di situs website pemerintah daerah di Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan laporan keuangan pada website pemerintah daerah.

### **Keterbatasan**

Berdasarkan pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya penelitian ini memiliki keterbatasan pada hal-hal berikut antara lain: (1) Tahun pengambilan sampel hanya menggunakan satu tahun yaitu tahun 2021. (2) Riset ini menganalisis 3 aspek ialah opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Masih banyak aspek ataupun variabel lain yang bisa pengaruhi penerbitan LKPD. (3) Memiliki keterbatasan dalam

hal ketersediaan data karena sebagian data tidak tersedia di web pemerintah daerah, sehingga peneliti perlu bekerja ekstra untuk mencari data di satuan kerja (SPOD) di bawah masing-masing pemerintah daerah yang diteliti.

### Saran

Sesuai dengan keterbatasan dalam penelitian yang sudah diterangkan, peneliti memberi saran sebagai pertimbangan yaitu, diharapkan pemerintah daerah lebih memperhatikan transparansi pemerintah daerah dengan menyediakan dan mempermudah akses untuk memperoleh informasi keuangan di website. Untuk penelitian selanjutnya diantisipasi bahwa variabel tambahan mengenai ketersediaan laporan keuangan oleh pemerintah daerah akan ditemukan melalui penelitian selanjutnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Kholida dan Bachtiar, E. (2014). Pengaruh Hasil Pemeriksaan BPK dan Faktor Politik Terhadap Tingkat Transparansi Keuangan dan Kinerja Di Website Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Anthony, N. R. dan G. (2011). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Karisma Publishing Group.
- Dasar, P. U., Republik, N., Tahun, I., Keuangan, B. P., Dasar, P. K. U., Viii, B., Pemeriksa, B., Pasal, K., & Keuangan, B. P. (1945). *Aspek hukum dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk*. 1–11.
- Fatmawati, D., Ekonomi, F., & Semarang, U. N. (2019). *Determinan kinerja pemerintah daerah : ukuran pmda, leverage, temuan audit dan tindak lanjutnya*. 3(1), 44–54.
- Kinerja, R., & Tengah, J. (2022). *Jurnal Isu Pemerintah Daerah ( LOGOS )*. 5(1), 49–62.
- Liestiani, A. (2008). *Pengungkapan LKPD Kabupaten/Kota Di Indonesia Untuk Tahun Anggaran 2006*. Sebelas Maret.
- Liu, J., & Lin, B. (2012). Government auditing and corruption control: Evidence from China's provincial panel data. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2012.01.002>
- Mulyadi. (2013). *Auditing*. Salemba Empat.
- Nasional, K., & Governance, K. (2008). *Good Public Governance Indonesia Diterbitkan oleh* : 1–50.
- Nor, W., Hudaya, M., & Novriyandana, R. (2019). Financial statements disclosure on Indonesian local government websites: A quest of its determinant(s). *Asian Journal of Accounting Research*, 4(1), 112–128. <https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2019-0043>
- Nosihana, Ariefia dan Yaya, R. (2016). *Uii 4*. 3(2), 87–101.
- Oka Purnawan Widodo, S. (2017). *Intern Dan Temuan Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*. 6(2010), 1–9.
- Oktofan, M. S. (2017). *Analisis Pengaruh Temuan Audit Dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Atas Opini Bpk (Studi Empiris pada Kementerian/Lembaga Tahun 2013-2015)*.
- Pauli, M. . (2015). No Title. *Ketidapatuhan Spi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*“, Pp. 1–19.
- Prasasti, A. M., Rahayu, S., Zultilisna, D., & Telkom, U. (2017). *Opini Audit , Tingkat Kemandirian , Dan Tipe Pemerintah*. 9(2), 94–103.

- Ridwan, M., & Yahya, M. R. (2020). Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Temuan Audit Bpk, Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dan Ukuran Legislatif Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(3), 429–437. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i3.16055>
- Sahmuddin., H. dan (Ed.). (2008). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pendekatan Kinerja*. Semarang (Badan Pene).
- Siregar, I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. 4, 101–124.
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Sofyani, H., & Dwirama, V. (2020). Determinan Praktik Internet Reporting oleh Pemerintah Daerah di Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(2), 158–168. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i2.5855>
- Terhadap, D., Pengungkapan, T., Keuangan, I., Non, D. A. N., Pada, K., Resmi, S., & Daerah, P. (2018). 1, 2 1. 5(3), 3507–3513.
- Trisnawati, M. D. dan A. K. (2020). Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. 21(1), 1–9. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>
- Umar, D. . (2012). *Pelatihan Metodologi Penelitian*. Modul.
- Verawaty. (2015). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–26.
- Yustikasari, Y. (2018). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Kompleksitas Pemerintahan, Dan Tingkat Kesejahteraan Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Informasi Keuangan Padawebsite Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Se – Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 11(1), 34–52. <https://doi.org/10.35448/jrat.v11i1.4193>